

**LAPORAN  
HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL  
Tahun Anggaran 2011**

JUDUL  
SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
DI ERA OTONOMI DAERAH

Tim Peneliti

Rr Herini Siti Aisyah , SH, MH .  
Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH, M.Hum  
Drs. Heru Irianto, MS.i  
Muis Murtadho, SE, MM



Dibiayai oleh DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional  
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian  
Nomor :392/SP2H/PL/Dit.litabmas/IV/2011 Tanggal 14 April 2011

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
2011

## A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

### RINGKASAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mensinyalir kualitas pengelolaan keuangan di daerah masih buruk tecermin dari banyaknya temuan BPK atas penyimpangan di daerah. Kondisi ini disebabkan oleh kompleksitas peraturan, kurangnya SDM, buruknya koordinasi dan tidak memadainya teknologi yang digunakan. Baik buruknya sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak lepas dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Sistem pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi serta akuntabelitas dalam pengelolaan keuangan daerah .

Agar dapat dikaji secara komprehensif dan holistik maka dalam tahun I digunakan pendekatan kualitatif *Socio Legal Researc*. Dengan pendekatan ini maka selain menggunakan pendekatan yang bersifat normatif juga menggunakan pendekatan lapangan yaitu mengkaji masalah-masalah hukum dengan melakukan penelitian lapangan. Lokasi penelitian pada Tahun I dilakukan di Sidoarjo Jawa Timur . Lokasi ini dipilih karena Sidoarjo sebagai daerah pemekaran Kota Surabaya merupakan daerah yang sedang berkembang sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul di Kab. Sidoarjo dapat dipakai sebagai pilot project di daerah lain .

Dalam penelitian ini disimpulkan : (1) BPKP lebih banyak berperan sebagai Fungsi Pembinaan sebagai Auditor Presiden dalam mengelola manajemen pemerintahan RI, sedangkan BPK menjalankan fungsi pengawasan yang sifatnya *post-audit*. (2) Hambatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah adalah :Secara mikro ada (1) Sinergisitas Pengawasam dan Pembinaan. (2) Lemahnya Pengawasan Internal. (3) Lemahnya .Pengawasan Kebijakan. Secara makro maka kurang efektifitasnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dikarenakan empat hal yaitu: (1) Adanya kepentingan politik kepala daerah. (2) Kurang adanya keteladanan dari pimpinan. (3) Kurangnya Komitmen elit politik terhadap *Good Governance* (4) Kompelksitas sistem pembinaan dan pengawasan. Dalam penelitian ini disarankan (1) Perlu dilakukan sinkronisasi program baik bagi pengawas eksternal (BPK) , pengawas internal (BPKP) maupun pengawas kebijakan (DPRD) (2) Perlu dilakukan: (a) Koordinasi antara penyelenggara Negara baik pusat maupun daerah (DPRD, BPK, BPKB maupun PemKab/Kot) (b) Perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitas SDM di setiap dinas yang ada di Pemkab./PemKot. (c) Perlunya pengawalan oleh masyarakat dalam penyusunan APBD. (3) . Agar sistem pembinaan dan pengawasan dapat diimpelentasikan dengan efektif dan efisien maka diperlukan adanya komitmen dan goodwill semua pihak serta keteladanan elit politik baik di legislatife, eksekutif maupun yudikatif. Untuk itu diperlukan adanya control dari masyarakat agar dapat terus mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas pubik dalam pelayanan public.

Kata Kunci: Sistem, Keuangan , Daerah, Otonomi, Pengawasan

## SUMMARY

State Audit Agency (BPK) indicated the quality of financial management in the region is still poorly reflected by the number of BPK findings of irregularities in the area. This condition is caused by the complexity of regulations, lack of human resources, poor coordination and insufficient technology used. Both poor financial management and accountability systems can not be separated from the stage area for preparing the Regional Budget (APBD)

This study aims to find the guidance and supervision system of local government financial management that can improve the effectiveness, efficiency, transparency and akuntabelitas in local finance.

To be reviewed holistically komprehenship and then in the year I used a qualitative approach Socio Legal Researc. With this approach in addition uses a normative approach also uses field approach which examines the legal issues by conducting field research. Location of research on the Year I do in Sidoarjo, East Java. This location was chosen because of Sidoarjo Surabaya City as the regional division is an area that is being developed so that the problems that arise in the district. Sidoarjo can be used as pilot projects in other areas.

In this study concluded: (1) BPKP more guidance as a function of acting as President of the Auditor in managing government management of RI. while the BPK exercises oversight of its post-audit. (2) Obstructing Development and Supervision of Financial Management in the Era of Regional Autonomy are: the micro level there are (1) synergy Pengawasam and Development. (2) Weak Internal Controls. (3) Weak Control Policy. At the macro then its effectiveness is less guidance and supervision of financial management of the area due to four issues: (1) The head of the regional political interests. (2) Lack of exemplary leadership. (3) Lack of commitment of political elites towards Good Governance (4) The complexity of guidance and control systems. In this study suggested (1) There needs to be synchronization programs for both external supervisors (BPK), the internal watchdog (BPKP) as well as regulatory policies (DPRD) (2) It should be done: (a) Coordination between the organizers of both central and regional state (parliament, BPK, or district government reg / Kot) (b) Need to improve the quality and quantity of human resources in every department that is in Pemkab. / municipal government. (C) The need for escorts by the public in the budget. (3). In order for the guidance and supervision system can diimpelentasikan effectively and efficiently will require the commitment and goodwill of all parties and political elites in both exemplary legislatife, executive and judicial branches. It required a control of the community in order to continue to encourage the creation of transparency and accountability of the pubic in public service.

Keywords: Systems, Finance, Region, Autonomy, Oversight